

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO PERTUMBUHAN,
RASIO KESERASIAN, RASIO EFISIENSI DAN RASIO
EFEKTIVITAS TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI BERDASARKAN APBD
PERIODE TAHUN 2015-2020**

SKRIPSI

OLEH :

**SRI WAHYUNI FEBRIYANTY GEA
188320365**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)16/9/22

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO PERTUMBUHAN, RASIO
KESERASIAN, RASIO EFISIENSI DAN RASIO EFEKTIVITAS
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI BERDASARKAN APBD
PERIODE TAHUN 2015-2020**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Ekonomi
Universitas Medan Area



OLEH :

**SRI WAHYUNI FEBRIYANTY GEA
188320365**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)16/9/22

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Periode Tahun 2015-2020

Nama : **SRI WAHYUNI FEBRIYANTY GEA**

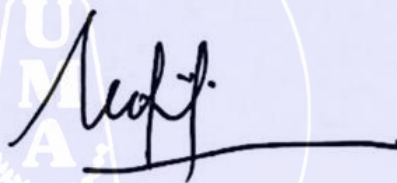
NPM : 18.832.0365

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing



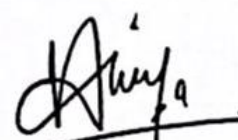
(Ir. M. Yamin Siregar, MM)

Pembimbing

Mengetahui :



(Ahmad Rafiq, MBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)
Dekan



(Nindya Yunita, S.Pd, M.Si)
Ka. Prodi Manajemen

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 14/Juni/2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 16/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/9/22

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi Dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Periode Tahun 2015-2020”, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana yang merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan judul yang dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan, atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi untuk program S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.



Medan, 14 Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan



Sri Wahyuni Febrivanty Gea
188320365

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuni Febriyanty Gea

NPM : 188320365

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi Dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Periode Tahun 2015-2020”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 14 Juni 2022
Yang menyatakan

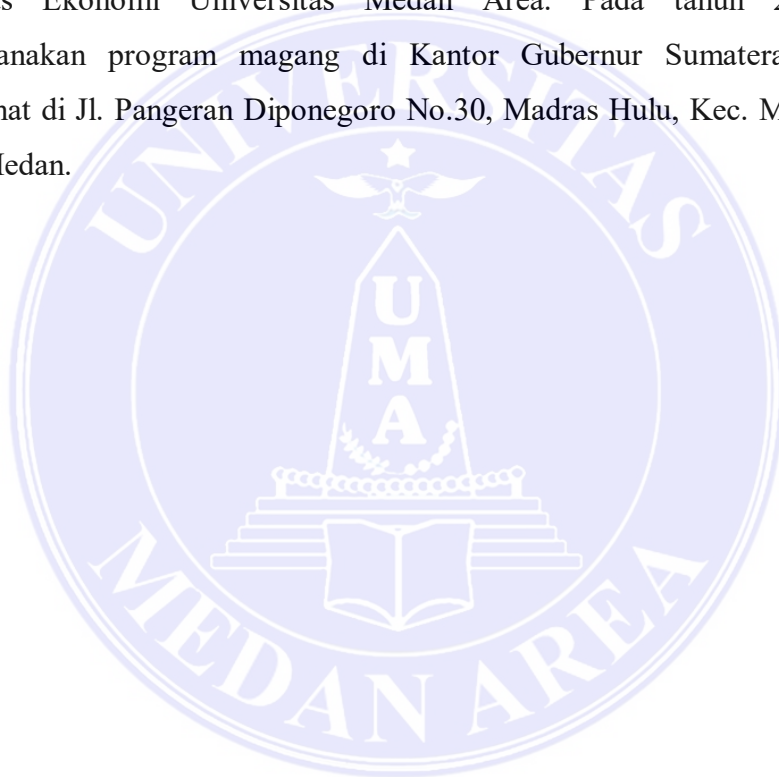


Sri Wahyuni Febriyanty Gea
188320365

RIWAYAT HIDUP

Sri Wahyuni Febriyanty Gea, adalah nama dari peneliti skripsi ini. Peneliti lahir pada tanggal 18 Februari 2001. Peneliti lahir di Kota Gunungsitoli yaitu salah satu kota di Pulau Nias, Sumatera Utara. Peneliti merupakan anak dari Bapak Izman Gea dan Ibu Sadaria Nduru. Peneliti memiliki dua saudari yaitu Mahrunnisa Gea dan Winda Safitri Gea.

Tahun 2018 peneliti dinyatakan lulus setelah menempuh pendidikan di SMA.N 1 Gunungsitoli, di tahun yang sama peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. Pada tahun 2021 peneliti melaksanakan program magang di Kantor Gubernur Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.30, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli periode tahun 2015-2020 berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data Dokumentasi yang berupa Laporan Realisasi Anggaran dan APBD tahun 2015 s/d 2020. Analisis data menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Dari hasil analisis, rasio kemandirian keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli tergolong pola hubungan instruktif (rendah sekali), rasio pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata 7,65%, rata-rata rasio keserasian belanja operasi 53,81% dan rata-rata belanja modal 28,40%, rasio efisiensi rata-rata sebesar 100,66% (tidak efisien), dan rata-rata rasio efektivitas sebesar 84,02% tergolong tidak efektif. Kinerja keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli tahun 2015 s/d 2020 dari aspek kemandirian menunjukkan pemerintah daerah masih belum mandiri, aspek pertumbuhan yang mengalami kenaikan dan penurunan yang cenderung fluktuatif, aspek keserasian dengan belanja operasi yang belum mendominasi dan belanja modal yang mendominasi, aspek efisiensi yang menunjukkan kinerja pemerintah masih belum efisien, dan aspek efektivitas masih tergolong tidak efektif.

Kata kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Kinerja Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to determine the government performance of Gunungsitoli City for the 2015-2020 period based on the Independence Ratio, Growth Ratio, Harmony Ratio, Efficiency Ratio, and Effectiveness Ratio. The research uses Documentation data collection techniques in the form of Budget Realization Reports and APBD for 2015 to 2020. Data analysis uses financial ratio analysis consisting of independence ratios, growth ratios, harmony ratios, efficiency ratios and effectiveness ratios. From the results of the analysis, the financial independence ratio of the Gunungsitoli City government is classified as an instructive relationship pattern (very low), the average regional income growth ratio is 7.65%, the average operating expenditure compatibility ratio is 53.84% and the average capital expenditure is 28,40%, the average efficiency ratio is 100.66% (inefficient), and the average effectiveness ratio is 84.02% classified as ineffective. The financial performance of the Gunungsitoli City government in 2015 to 2020 from the aspect of independence shows that the regional government is still not independent, the aspect of growth that has increased and decreased which tends to fluctuate, aspects of compatibility with operating expenditures that do not dominate and capital expenditures dominate, aspects of efficiency that show the government's performance is still not efficient, and the effectiveness aspect is still classified as ineffective.

Keywords : Independence Ratio, Growth Ratio, Harmony Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio, and Government Performance

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin tiada kata selain puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yaitu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kereserasian, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Periode Tahun 2015-2020”**. Shalawat serta salam yang tak lupa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah menarik tangan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini tak lepas dari do'a, nasehat serta cinta dan kasih sayang yang tak terhingga dari pihak keluarga yaitu kedua orang tua dan kedua saudari peneliti. Dan tak lepas pula dari bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak lainnya. Oleh karena itu terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Ketua Sidang.
3. Ibu Sari Nuzulinna Rahmadhani, SE, Ak, M.Acc, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

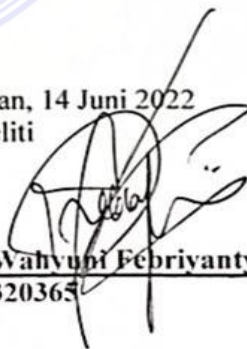
merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

4. Ibu Wan Rizca Amelia, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Pengembangan SDM dan Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Wan Suryani, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
6. Ibu Rana Fathinah, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
7. Ibu Nindya Yunita S.Pd, M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area dan selaku Dosen Sekretaris Sidang peneliti yang selalu memberikan masukan.
8. Ibu Muthya Rahmi Darmansyah, SE. MSc, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
9. Bapak Ir. M. Yamin Siregar, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi dan memberikan bimbingan, arahan serta dukungan dengan sabar dan bertanggung jawab hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Drs. Patar Marbun, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memeriksa dan memberikan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.

11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai beserta seluruh Staf Pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
12. Dan kepada yang tersayang sahabat-sahabat saya yaitu : Dwi Aulia, Tiara Aulia, Syakila Muarifa, Chevinson Julka, Ikhlas Zebua, dan Winda Nashirah yang selalu memberikan dukungan serta masukan bagi saya selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu peneliti dengan senang hati menerima saran dan kritik untuk menyempurnakan skripsi ini. Walaupun demikian peneliti berusaha sebaik mungkin dalam memberikan hasil yang terbaik dari ketidaksempurnaan yang ada. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Kepada Allah Swt kita berserah diri, dan semoga Allah Swt membalas segala kebaikan kita semua dengan rahmat dan hidayah-Nya. Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

Medan, 14 Juni 2022
Peneliti


Sri Wahyuni Febriyanty Gea
188320365

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
RIWAYAT HIDUP
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pengertian Kinerja	9
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.1.3 Laporan Keuangan.....	13
2.1.4 APBD.....	15
2.1.5 Rasio Keuangan.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Konseptual	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis dan Waktu Penelitian	29
3.2 Populasi dan Sampel	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.4 Definisi Dan Indikator Operasional Variabel Penelitian.....	31
3.4.1 Definisi Variabel Penelitian	31
3.4.2 Indikator Operasional Variabel Penelitian.....	33
3.5 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Deskripsi Objek.....	35
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Gunungsitoli	37
4.1.3 Analisis Kinerja Pemerintah Berdasarkan APBD	38
4.2 Pembahasan	55
4.2.1 Rasio Kemandirian	55
4.2.2 Rasio Pertumbuhan.....	57

4.2.3	Rasio Keserasian	58
4.2.4	Rasio Efisiensi.....	61
4.2.5	Rasio Efektivitas.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....		68
LAMPIRAN.....		Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	29
Tabel 3.2 Definisi dan Indikator Operasional Variabel Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Gunungsitoli	38
Tabel 4.2 Pendapatan Dana Perimbangan Kota Gunungsitoli	38
Tabel 4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	39
Tabel 4.4 Rasio Kemandirian Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli.....	39
Tabel 4.5 Rasio Pertumbuhan Kinerja Keuangan Kota Gunungsitoli	42
Tabel 4.6 Belanja Operasi Keuangan Kota Gunungsitoli	44
Tabel 4.7 Rasio Belanja Operasi Kinerja Keuangan Kota Gunungsitoli.....	44
Tabel 4.8 Rasio Belanja Modal Kinerja Keuangan Kota Gunungsitoli	45
Tabel 4.9 Realisasi Belanja Daerah Keuangan Kota Gunungsitoli	49
Tabel 4.10 Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Kota Gunungsitoli	49
Tabel 4.11 Target PAD Pada APBD Kota Gunungsitoli	51
Tabel 4.12 Realisasi PAD Kota Gunungsitoli.....	52
Tabel 4.13 Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Kota Gunungsitoli	52



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	28
Gambar 4.1 Letak Kota Gunungsitoli.....	35
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kota Gunungsitoli.....	37
Gambar 4.3 Rasio Kemandirian Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli	40
Gambar 4.4 Rasio Pertumbuhan Kinerja Keuangan Kota Gunungsitoli	43
Gambar 4.5 Rasio Keserasian Kinerja Keuangan Kota Gunungsitoli	46
Gambar 4.6 Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Kota Gunungsitoli	50
Gambar 4.7 Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Kota Gunungsitoli	53



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Penelitian.....	71
Lampiran 2 <i>Output</i> Hasil Penelitian	79
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip otonomi daerah sangat berkaitan erat dengan pembangunan daerah yang juga termasuk bagian dari pembangunan nasional. Otoritas dan kewajiban daerah dalam melaksanakan kepentingan masyarakatnya didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban, keterbukaan dan partisipasi. Alasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yakni untuk membenahi dan memperbaharui kinerja pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan memiliki otoritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta pengelolaan keuangan daerah yang memegang kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang mencakup segala kegiatan yang melibatkan pelaporan, penatausahaan, penerimaan, dan pelaksanaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan kinerja setiap instansi pemerintah daerah menjadi perhatian karena mengatur segala perencanaan aktivitas pemerintah dalam satu periode. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah.

Perkembangan kinerja pemerintah dalam meraih wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dipengaruhi oleh prosedur pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah tidak dapat merealisasikan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa dana yang memadai dalam mewujudkan pelayanan, pembangunan dan menjadi dasar tolak ukur dalam melihat secara *real*

kemampuan daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri yang mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang mampu menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan (Sari, 2016). Kinerja keuangan merupakan pencapaian hasil kerja dalam bidang keuangan yang mencakup pemasukan dan belanja daerah yang bertujuan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengurus dan mengontrol finansialnya serta memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pembangunan sangat penting dilaksanakan secara berkala melalui suguhan data statistik yang berkualitas.

Merujuk pada fakta kinerja pemerintah daerah di Indonesia masih terbilang buruk dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah, sesuai dengan pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), maka tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dalam instansi pemerintah pengukuran kinerja tidak diukur dengan rasio yang umumnya didapatkan dari sebuah laporan keuangan, karena dalam instansi pemerintah tidak berorientasikan laba (*net profit*). Penilaian kinerja keuangan dapat menggunakan pendekatan rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan sangat diperlukan untuk dilaksanakan dalam strategi dan rencana pengelolaan keuangan daerah agar terciptanya laporan keuangan yang bersifat demokratis, akuntabel, jujur, dan terbuka, serta mampu mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi alternatif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah melalui laporan keuangan yang telah dihasilkan. Salah satu

instrumen untuk menganalisis kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan analisis pendekatan rasio keuangan terhadap APBD yang terdiri dari lima jenis rasio yakni : rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

1. Rasio Kemandirian : Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan urusan pemerintahan. Kemandirian suatu daerah menunjukkan ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan eksternal, terutama bantuan dari pemerintah pusat/provinsi. Tingkat kemandirian keuangan menurut Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, kemampuan keuangan dinyatakan sangat rendah apabila nilai rasio 0%-25%; rendah jika nilai rasio 25%-50%; sedang 50%-75%; dan dinyatakan tinggi jika nilai rasio 75%-100%.
2. Rasio Pertumbuhan : Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah. Apabila pertumbuhan tiap-tiap elemen sumber pendapatan dan pengeluaran telah terdeteksi maka dapat dimanfaatkan untuk menimbang potensi mana yang harus menjadi atensi utama. Rasio pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui kondisi kinerja anggaran jika mengalami pertumbuhan dalam taksiran pendapatan atau belanja secara positif atau negatif selama beberapa periode anggaran. Semakin besar rasio pertumbuhan tiap tahun maka kinerja pemerintah daerah diakui baik.
3. Rasio Keserasian : Rasio keserasian digunakan untuk mengetahui cara pemerintahan daerah dalam pengalokasian dana yang dimanfaatkan dalam

belanja rutin (operasi) dan belanja modal (pembangunan) secara optimal. Semakin besar persentase biaya yang dialokasikan untuk belanja rutin maka persentase belanja modal yang dipakai untuk mengadakan infrastruktur ekonomi masyarakat semakin rendah, sedangkan jika persentase belanja rutin rendah maka persentase belanja modal semakin besar (Halim, 2012:236). Rasio belanja rutin merupakan perbandingan total belanja operasi dengan total belanja daerah yang menunjukkan ukuran belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Porsi belanja rutin mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Belanja modal merupakan perbandingan realisasi belanja pembangunan dengan belanja daerah yang porsi belanjanya antara 5-20% (mendominasi).

4. Rasio Efisiensi : Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, efisien merupakan perolehan *output* yang maksimal dengan *input* tertentu ataupun pemanfaatan *input* rendah untuk mencapai *output* tertentu. *Input* merupakan segala sesuatu yang diperlukan agar penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan untuk memperoleh keluaran. *Output* merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh dari suatu aktivitas yang berupa fisik dan non fisik. Menurut Abdul dan Muhammad (2019:163), efisiensi merupakan sebuah alat ukur berupa rasio yang membandingkan antara *input* yang digunakan terhadap *output* yang diperoleh. Kriteria efisiensi kinerja menurut Mhd Ichwan Cahyadi (2012:38) antara lain : apabila nilai rasio >100% maka dinyatakan tidak efisien; 90%-100% dinyatakan kurang efisien; 80%-90% dinyatakan cukup efisien; 60%-80% dinyatakan efisien; dan jika nilai rasio <60% sangat efisien.

5. Rasio Efektivitas : Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas merupakan perolehan hasil rancangan terhadap target yang telah ditentukan, yaitu dengan cara membandingkan *output* dengan hasil. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana yang dianggarkan. Penilaian kinerja pada rasio efektivitas harus mencapai 100% agar kinerja dapat dinyatakan baik. Menurut Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996, apabila nilai rasio >100% berarti sangat efektif, 90-100% dinyatakan efektif, 80-90% cukup efektif, 60-80% berarti kurang efektif, dan jika nilai rasio <60% dinyatakan tidak efektif.

Berdasarkan pemakaian kelima jenis rasio keuangan tersebut pemerintah daerah bisa melakukan pertimbangan terhadap pengeluaran dana dalam menerima pendapatan sehingga dapat berupaya meminimalkan dana yang dikeluarkan tetapi pendapatan yang diterima dapat tetap bertambah. Penilaian ini juga menunjukkan bagaimana perkembangan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan seperti pengalokasian biaya untuk belanja rutin dan belanja modal agar pada periode selanjutnya akan lebih optimal dalam mendorong pembangunan daerah.

Peneliti memilih Kota Gunungsitoli sebagai objek penelitian karena mempunyai visi yaitu terbentuknya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan sebagai pilar realisasi pemerintah yang baik (*good government*) melalui pengembangan kinerja aparatur pemerintah. Namun jika ditinjau pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kota Gunungsitoli tahun 2017, realisasi anggaran BAPPEDA pada belanja langsung dialokasikan pada beberapa kegiatan salah satunya 16 program pelayanan administrasi

perkantoran yang mana dengan penyerapan anggaran belanja langsung dengan persentase yaitu 95,94%, dibanding dengan anggaran program perencanaan pembangunan daerah yang persentase serta kegiatannya kurang dari persentase program pelayanan administrasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah masih belum optimal dalam mengalokasikan anggaran pendapatan daerah. Oleh sebab itu, kinerja pemerintah dapat ditinjau dan dianalisis berdasarkan susunan laporan APBD dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan periode tahun 2015-2020, sehingga dapat disimpulkan kelebihan serta kekurangan dari kinerja pemerintahan dalam kurun waktu 6 tahun. Pengukuran ini akan menunjukkan sekiranya jika terdapat kekurangan dari kinerja pemerintah maka dapat diperbaharui serta dievaluasi untuk kedepannya.

Kota Gunungsitoli memiliki hasil kerja dan target tertentu yang akan diraih. Dalam perencanaan perolehan hasil kerja serta target tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya dan konsumsi dana yang rendah secara optimal. Peneliti memilih Kota Gunungsitoli karena jika dibandingkan dengan kota lain dengan anggaran yang sama tetapi memiliki infrastruktur yang lebih unggul. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kecerahan, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Periode Tahun 2015-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : “kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD, sebagian besar belum optimal berdasarkan beberapa variabel

penelitian seperti rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas sehingga hal ini tidak sejalan sesuai dengan kinerja keuangan yang diharapkan”. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Rasio Kemandirian terhadap kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020?
2. Bagaimana Rasio Pertumbuhan terhadap kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020?
3. Bagaimana Rasio Keserasian terhadap kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020?
4. Bagaimana Rasio Efisien terhadap kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020?
5. Bagaimana Rasio Efektivitas terhadap kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Rasio Kemandirian terhadap kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020
2. Untuk mengetahui Rasio Pertumbuhan terhadap kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020
3. Untuk mengetahui Rasio Keserasian terhadap kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020

4. Untuk mengetahui Rasio Efisiensi terhadap kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020
5. Untuk mengetahui Rasio Efektivitas terhadap kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam hal analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan untuk mengetahui bagaimana daerah melaksanakan otonomi daerah serta mengetahui pertumbuhan daerah dalam hal perolehan pendapatan dan pengeluaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang penilaian kinerja keuangan selama masa perkuliahan khususnya pada bidang keuangan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan ilmu, informasi bermanfaat, acuan evaluasi, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan serta memperbaharui kinerja pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

c. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang analisis kinerja keuangan dan menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya. Terlebih jika adanya perluasan ruang lingkup wilayah penelitian dan penambahan periode yang panjang agar lebih akurat dan mampu membandingkan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran tentang takaran pencapaian realisasi suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan, visi, misi, serta target dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Kinerja keuangan adalah analisis yang dapat digunakan dalam menelusuri sejauh mana suatu entitas telah mewujudkan target dengan menerapkan aturan pelaksanaan keuangan secara tepat (Fahmi, 2012:2). Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:71-73) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian mengemukakan bahwa kinerja merupakan kesimpulan dari penilaian terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan, hasil tersebut dibandingkan dengan tolak ukur yang ditentukan bersama terlebih dahulu.

Menurut Sutrisno (2016:172) kinerja merupakan hasil kerja pegawai yang dinilai dari beberapa aspek yaitu aspek kualitas, aspek kuantitas, aspek waktu kerja, dan aspek kerja sama dalam meraih tujuan yang ditetapkan sebelumnya oleh pihak organisasi. Kinerja adalah kualitas dan kuantitas suatu hasil kerja personal atau kelompok dalam melakukan tugas utama serta fungsi yang berlandaskan standar operasional prosedur, norma, tolak ukur yang berlaku dalam organisasi (Torang, 2014:74).

Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, kinerja merupakan hasil dari aktivitas telah dicapai sehubungan dengan pemanfaatan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.

Menurut Mangkunegara (2017:67) kinerja adalah kualitas dan kuantitas hasil kerja yang diraih oleh seseorang dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Menurut Levinson (2012:229) kinerja merupakan prestasi yang bersangkutan dengan tugas yang telah dibebankan kepada seseorang. Kinerja adalah pencapaian yang diraih oleh sebuah organisasi baik bersifat laba dan non laba dalam satu periode (Edison, 2016:176).

2.1.1.1 Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2016:121) Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilaksanakan dengan tujuan yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, menyokong pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, merealisasikan pertanggungjawaban publik dan memperbaharui komunikasi kelembagaan. Mahmudi (2019:60) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan komponen dari manfaat pengendalian manajemen sebab pengukuran kinerja berguna dalam pelaksanaan pengendalian aktivitas. Seluruh aktivitas harus memiliki ukuran kinerja agar dapat membuktikan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerjanya. Dalam ruang lingkup organisasi sektor publik pengukuran kinerja utamanya dilakukan untuk mengukur skala 3E, yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Apabila suatu kegiatan perusahaan tidak memiliki ukuran kinerja, maka hal tersebut akan menambah kesulitan bagi organisasi untuk menentukan apakah kegiatan tersebut sukses atau malah menjadi kegiatan yang sia-sia.

Menurut Mahmudi (2019:45), pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dalam meraih target utama organisasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, ukuran kinerja juga bermakna memberikan pilar-pilar

sejauh mana tujuan organisasi tercapai. Tujuan pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik, diantaranya :

1. Dapat memperbaharui (*upgrade*) kinerja organisasi sektor publik di masa mendatang agar maksimal dalam meraih target yang direncanakan.
2. Sebagai sasaran peninjauan dalam pengambilan keputusan.
3. Membentuk tanggung jawab untuk masyarakat umum.
4. Instrumen menyampaikan strategi organisasi antara atasan dan pegawai
5. Wadah untuk mendistribusikan sumber daya.
6. Membentuk akuntabilitas publik.

2.1.1.2 Indikator Pengukuran Kinerja

Menurut Sedarmayanti (2014:198) “Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan skala pencapaian target yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja harus berupa sesuatu yang akan dihitung dan dinilai serta dipakai sebagai dasar untuk menilai atau menganalisis tingkat kinerja, baik itu pada tahap *planning*, pelaksanaan, maupun kegiatan selesai. Mahsun (2017:196) memaparkan bahwa indikator kinerja keuangan pemerintah daerah ditentukan dengan pertimbangan :

1. *Input* (masukan) adalah segala yang dibutuhkan agar penyelenggaraan program dapat berjalan untuk memperoleh *output*, seperti: total biaya yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, jumlah waktu yang digunakan serta total karyawan yang diperlukan.
2. *Process* (proses) adalah peringkasan nilai aktivitas, baik dari segi ketepatan, kecepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan aktivitas tersebut. Seperti:

kepatuhan pada peraturan dan rata-rata yang dibutuhkan dalam memperoleh layanan dan jasa.

3. *Output* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung diraih dari suatu aktivitas berupa fisik atau nonfisik. Seperti: jasa/barang yang diperoleh.
4. *Outcome* (hasil) adalah suatu kegunaan *output* kegiatan dalam jangka menengah seperti: skala kualitas barang dan jasa dan produktivitas pegawai.
5. *Benefit* (manfaat) adalah tujuan akhir dari penyelenggaraan kegiatan seperti skala kepuasan dan kontribusi masyarakat.
6. *Impact* (dampak) adalah efek yang diakibatkan baik positif maupun negatif. Atau timbulnya pengaruh positif maupun negatif terhadap setiap skala indikator yang didasarkan dengan dugaan yang telah ditentukan. Seperti: peningkatan kesejahteraan dan pemasukan masyarakat.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sari (2016) mengungkapkan salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat keberhasilan di bidang finansial daerah yang merangkum pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan oleh kebijakan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Menurut Sumarjo dalam Nurulafifah (2013:3) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari suatu program yang telah diraih sehubungan dengan pemanfaatan anggaran keuangan suatu daerah dengan kualitas, kuantitas, kemampuan daerah yang terukur dengan menilai efisiensi terhadap pelayanan publik. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang

digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah atau gambaran keberhasilan suatu program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang akan dinilai menggunakan indikator keuangan (Halim, 2012:232). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan atas realisasi suatu program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, target, dan tujuan pemerintah daerah (Mahsun, 2013: 25).

Berdasarkan penilaian kinerja keuangan, akan memperlihatkan peluang pertumbuhan dan perkembangan keuangan suatu perusahaan. Berhasilnya sebuah perusahaan terjadi apabila telah meraih suatu kinerja tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (Hery, 2015). Kinerja keuangan oleh Rudianto (2013:189) diartikan sebagai prestasi yang diraih oleh manajemen perusahaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan harta perusahaan secara efektif pada waktu tertentu. Kinerja keuangan penting diketahui perusahaan agar dapat mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan. Seluruh kegiatan yang telah selesai dikerjakan perlu dilakukan pengukuran secara periodik dengan memanfaatkan laporan keuangan sebagai dasar pengukuran kinerja.

2.1.3 Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2012:7) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang memperlihatkan keadaan keuangan perusahaan saat ini atau dalam periode tertentu. Dalam laporan keuangan, seluruh perusahaan berkewajiban untuk membentuk, melaporkan, menyampaikan, kemudian menganalisis keuangan perusahaannya untuk menunjukkan keadaan serta posisi suatu perusahaan dalam

periode tertentu. Setelahnya laporan keuangan digunakan sebagai alat identifikasi berbagai permasalahan berupa kelebihan maupun kelemahan perusahaan yang dapat dibentuk perusahaan saat ini maupun untuk waktu yang akan datang.

Laporan keuangan menurut IAI Standar Akuntansi Keuangan (2015) meliputi:

1. Neraca yakni laporan keuangan yang meliputi: aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, maupun liabilitas jangka panjang serta *ekuitas*.
2. Laporan Arus Kas yaitu laporan kemampuan perusahaan dalam memperoleh kas (arus kas investasi, arus kas operasi dan arus kas pendapatan).
3. Laporan Laba Rugi Komprehensif, yang bermanfaat dalam menganalisis profit dan kerugian perusahaan dalam periode tertentu dan mengestimasi profit perusahaan untuk waktu yang akan datang. Terdiri dari dua elemen diantaranya pendapatan (penjualan) dan pengeluaran (biaya).
4. Catatan Atas Laporan Keuangan yaitu catatan yang menyediakan tambahan informasi mengenai perihal yang disajikan dalam seluruh keuangan, catatan ini berisi informasi terkait pos-pos yang tidak mencukupi tolak ukur pengakuan dalam laporan keuangan yang bersangkutan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas, digunakan dalam menyatakan besarnya modal perusahaan yang dipengaruhi oleh profit maupun kerugian yang dialami oleh perusahaan dan menginformasikan jumlah dividen yang telah diberikan kepada para pemilik saham.

Menurut Kasmir (2012:66-72) analisis laporan keuangan perlu dilakukan agar laporan keuangan menjadi lebih berguna sehingga bisa dimengerti dan dipahami oleh berbagai pihak. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, akan terlihat apakah perusahaan telah mencapai sasaran yang telah direncanakan

atau tidak. Tujuan utama analisis laporan keuangan yaitu untuk mengetahui posisi keuangan yang mengidentifikasi pencapaian target yang direncanakan sebelumnya, bagi pihak manajemen dapat digunakan dalam mengambil keputusan yang tepat dan sebagai bahan merencanakan kegiatan di masa depan.

2.1.4 APBD

Menurut Permendagri RI nomor 37 tahun 2014 mengenai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, APBD adalah agenda keuangan tahunan pemerintah daerah yang diulas serta disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditentukan dengan peraturan daerah. Berdasarkan PP Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006, laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Menurut Permendagri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015, prinsip pembentukan APBD didasarkan sebagai berikut:

1. Transparan (terbuka), mempermudah masyarakat dalam memahami serta memperoleh akses informasi mengenai APBD.
2. Sinkron terhadap keperluan pengurusan pemerintahan berdasarkan kegiatan serta kewenangannya.
3. Partisipatif, dengan menyertakan masyarakat.
4. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dari peraturan daerah lainnya.
5. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan susunan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Menurut Abdul dan Iqbal (2019:225), APBD disusun dengan tujuan sebagai pedoman ataupun petunjuk oleh pemerintah daerah dalam mengelola pemasukan dan belanja untuk penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga jika terjadi pemborosan, kesalahan ataupun penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Adapun tujuan APBD yang lain yaitu:

- a. Mendukung pemerintah daerah dalam meraih tujuan fiskal dan memajukan koordinasi antar divisi dalam lingkungan pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan koordinasi tiap-tiap bagian lingkungan pemerintah daerah.
- c. Mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam menyajikan barang dan jasa dengan proses pengutamaan.
- d. Meningkatkan keterbukaan pemerintah daerah terhadap publik dan dapat mempertanggungjawabkan kepada DPRD.

2.1.5 Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2017:104) Rasio Keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Menurut Sudana (2012:33) rasio dapat dikatakan suatu analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca dan laba/rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi dalam pengelolaan keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan (Abdul Halim, 2012). Menurut Fahmi (2013:4) fungsi dan manfaat rasio keuangan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penilaian bagian *stakeholder* perusahaan.
2. Tolak ukur dalam mengevaluasi perusahaan dari perspektif finansial.
3. Oleh pihak manajemen dijadikan petunjuk dalam membentuk perencanaan.
4. Instrumen penilaian kinerja dan prestasi perusahaan.
5. Memprediksi potensi risiko yang dikaitkan dengan adanya jaminan berjalannya pembayaran bunga serta pengembalian pokok pinjaman.

Adapun dengan membandingkan perolehan hasil antar periode maka dapat dilakukan analisis rasio keuangan sehingga diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Rasio keuangan daerah yang diaplikasikan berdasarkan data keuangan yaitu APBD terdiri dari rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas (Abdul Halim, 2012).

2.1.5.1 Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah sangat berkaitan dengan besar atau kecilnya PAD yang selanjutnya dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pihak eksternal, seperti pinjaman maupun bantuan pemerintah pusat. Rasio kemandirian diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan suatu daerah menggambarkan 2 hal yaitu :

1. Tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Apabila rasio kemandirian tinggi, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal (bantuan pemerintah pusat) semakin rendah. Sebaliknya, jika rasio kemandirian daerah semakin rendah maka tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat semakin tinggi (Djpk-Kemenkeu, 2013:22).

2. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Jika tingkat kontribusi masyarakat tinggi, rasio kemandirian daerah tersebut juga tinggi. Namun apabila tingkat kontribusi masyarakat rendah maka rasio kemandirian daerah tersebut juga rendah.

Pada perhitungan rasio kemandirian digunakan anggaran pendapatan asli daerah dibanding dengan bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman yang mana terdiri dari beberapa bagian meliputi (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) :

1. PAD (pendapatan asli daerah) merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemungutan berdasarkan PerDa sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kewenangan untuk daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya dalam mewujudkan desentralisasi. PAD diperoleh dari beberapa sumber yakni :
 - a. Pajak Daerah yaitu pembayaran wajib kepada daerah yang terutang berasal dari personal ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan komisi secara langsung untuk keperluan daerah (UU No. 28 tahun 2009).
 - b. Retribusi Daerah yaitu tarif daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perolehan izin tertentu dari PemDa untuk kepentingan pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009).
 - c. Lain-lain PAD yang Sah yaitu terbagi atas: jasa giro; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; total pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; tarif ataupun bentuk lain dari penjualan maupun pengadaan barang dan jasa oleh daerah; tuntutan

ganti rugi; total penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; dan pendapatan bunga.

2. Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh dari APBN untuk daerah dalam mendanai pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari tiga bagian:

- a. DBH (dana bagi hasil) yaitu dana yang berasal dari APBN kepada daerah sesuai angka persentase untuk membiayai keperluan daerah.
- b. DAU (dana alokasi umum) yaitu dana yang berasal dari APBN dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam membiayai aktifitas desentralisasi.
- c. DAK (dana alokasi khusus) yaitu dana yang berasal dari pendapatan APBN kepada daerah untuk mendanai aktifitas khusus dalam urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pendapatan ini terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari pemerintah, badan, ataupun lembaga dalam dan luar negeri baik dalam bentuk devisa, rupiah, jasa, tenaga ahli dan pelatihan yang tidak dibayar kembali.
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yaitu bagian daerah yang bersumber dari dana pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yaitu dana yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan kebijakan tertentu dari pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan.
- d. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lain yaitu dana untuk strategi pemerintah dalam pemerataan dan percepatan pembangunan antar daerah.
- e. Pendapatan Lain-lain yaitu pendapatan yang bersumber dari bukan aktifitas khusus pemerintah.

Secara konseptual, pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan sesuai dengan kompetensi daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan. Menurut Puput Risky Pramita (2015:33) petunjuk dalam menganalisis pola hubungan dari sisi keuangan terdiri dari:

1. Pola hubungan instruktif (0-25%) : peranan pemerintah pusat lebih besar (dominan) dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah belum mandiri dalam menjalankan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif (>25-50%) : berkurangnya campur tangan pemerintah pusat karena daerah dinyatakan sedikit lebih mampu menjalankan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif (>50-75%) : dimana peranan pemerintah pusat mulai berkurang, mengingat daerah yang berkaitan tingkat kemandiriannya mengarah mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif (>75-100%) : tidak adanya campur tangan pemerintah pusat karena daerah sudah benar-benar mandiri dalam menjalankan urusan otonomi daerah.

2.1.5.2 Rasio Pertumbuhan

Fahmi (2012:69) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur besarnya kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Menurut Welio Wonda (2016:198), rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai pemerintah daerah dalam melaksanakan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kedudukan ekonominya yang telah diraih dari satu periode ke periode selanjutnya, yang dinyatakan baik jika tiap tahunnya mengalami peningkatan. Karena apabila semakin besar penerimaan pendapatan tiap tahun maka kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik. Rumus rasio pertumbuhan yaitu :

$$\frac{\text{pendapatan tahun berjalan} - \text{pendapatan tahun sebelumnya}}{\text{pendapatan tahun sebelumnya}}$$

2.1.5.3 Rasio Keserasian

Rasio keserasian bermanfaat dalam mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini berkaitan dengan manfaat anggaran yaitu sebagai alat alokasi, distribusi, serta stabilisasi. Pemerintah perlu membentuk harmonisasi belanja agar manfaat anggaran tersebut berjalan baik. Belanja rutin (operasi) adalah belanja yang nilai kegunaannya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek serta dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang (*recurrent*). Belanja modal (pembangunan) adalah belanja yang manfaatnya bersifat jangka menengah dan panjang namun tidak bersifat rutin serta akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah dalam hal menambah aset daerah (Mahmudi, 2019:160). Rumus rasio keserasian yaitu :

$$\text{Rasio belanja rutin} = \frac{\text{Belanja operasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{Belanja pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Rasio belanja operasi dan rasio belanja modal masih belum mempunyai tolok ukur yang pasti, karena kedua rasio ini sangat dipengaruhi oleh dinamisasi aktivitas pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi dalam meraih pertumbuhan yang diharapkan (Abdul Halim, 2012). Sebagai daerah bagian dari negara berkembang, kewajiban pemerintah daerah dalam memacu penyelenggaraan pembangunan masih terbilang rendah, akibatnya rasio belanja pembangunan daerah juga relatif rendah, sehingga perlu peningkatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah yang bersangkutan. Welio Wonda (2016:198) juga mengemukakan, jika perkembangan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal cenderung fluktuatif maka proporsi belanja modal kuantitasnya masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanja operasi. Pada belanja operasi terdapat uraian belanja yang terdiri dari (Peraturan Menteri Keuangan Tentang Klasifikasi Anggaran, 2019) :

1. Belanja Pegawai yaitu kompensasi uang ataupun barang untuk pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung organisasi.
2. Belanja Barang dan Jasa yaitu pemakaian dana dalam pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang di pasarkan atau tidak serta pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat diluar kriteria BanSos.
3. Belanja Hibah yaitu pendayagunaan dalam pengalihan hak kepada pihak lain secara spesifik telah ditentukan melalui lajur perjanjian.

4. Bantuan Sosial yaitu pemakaian dana oleh pemerintah kepada masyarakat tidak mampu guna dalam kesejahteraan masyarakat.
5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi dan Pemerintahan Desa yaitu anggaran yang diberikan secara proposional kepada partai politik untuk mendapatkan kursi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi.
6. Belanja Tidak Terduga yaitu penggunaan dana untuk keadaan darurat ataupun kebutuhan mendesak dan pengembalian atas kelebihan pembayaran dan penerimaan daerah tahun sebelumnya.

2.1.5.4 Rasio Efisien

Menurut Mahmudi (2019:85), efisiensi merupakan perbandingan antara pengeluaran (*output*) dengan pemasukan (*input*). Suatu program organisasi dinyatakan efisien bila sanggup dalam memperoleh *output* tertentu dengan *input* seminimal mungkin, atau dengan *input* tertentu sanggup dalam memperoleh *output* semaksimal mungkin (*spending well*). Rasio ini mengukur taraf penghematan anggaran yang dilaksanakan pemerintah dengan angka yang tidak bersifat absolut tetapi relatif, pemerintah dinilai telah efisien kinerjanya apabila rasio efisiensi anggaran kurang dari 100% (Mahmudi, 2019:164). Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja dengan standar belanjanya. Suatu kinerja dikatakan efisiensi jika dengan rasio antara 60,01% - 80%, jika semakin kecil rasio maka kinerja semakin efisien dan jika rasio semakin besar maka kinerja semakin tidak efisien.

Pada rasio ini terdapat belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung merupakan anggaran yang dibelanjakan serta bersangkutan secara langsung dengan perwujudan kegiatan, seperti belanja barang dan jasa, belanja

modal serta belanja pegawai. Belanja tidak langsung merupakan anggaran yang dibelanjakan tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan seperti, pembayaran upah, tunjangan kepada pegawai yang ditentukan oleh undang-undang, belanja tidak terduga, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial (Permendagri No. 13 tahun 2006). Rumus rasio efisiensi yaitu :

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Standar efisiensi menurut Mahsun (2013:187) sebagai berikut :

1. Apabila nilai rasio kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efisien.
2. Apabila nilai rasio sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisien berimbang.
3. Apabila nilai rasio lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efisien.

2.1.5.5 Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2014:267) rasio efektivitas adalah instrumen rasio keuangan yang dipakai berdasarkan data keuangan yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian suatu program pada sektor publik sehingga suatu program dinyatakan efektif apabila kegiatan tersebut berpengaruh besar terhadap kompetensi dalam menyajikan pelayanan masyarakat yang menjadi target yang ditentukan sebelumnya. Rasio efektivitas juga merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan alokasi dana daerah yang

direncanakan dan dibandingkan dengan anggaran yang ditentukan. Rumus rasio efektivitas yaitu :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD berdasarkan potensi riil}} \times 100\%$$

Menurut Mahsun (2016:187-188) tolak ukur efektivitas sebagai berikut:

1. Jika diraih nilai rasio kurang dari 100% ($X < 100\%$) bermakna tidak efektif.
2. Jika diraih nilai rasio sama dengan 100% ($X = 100\%$) bermakna efektivitas berimbang.
3. Jika diraih nilai rasio lebih dari 100% ($X > 100\%$) bermakna efektif

2.2 Penelitian Terdahulu

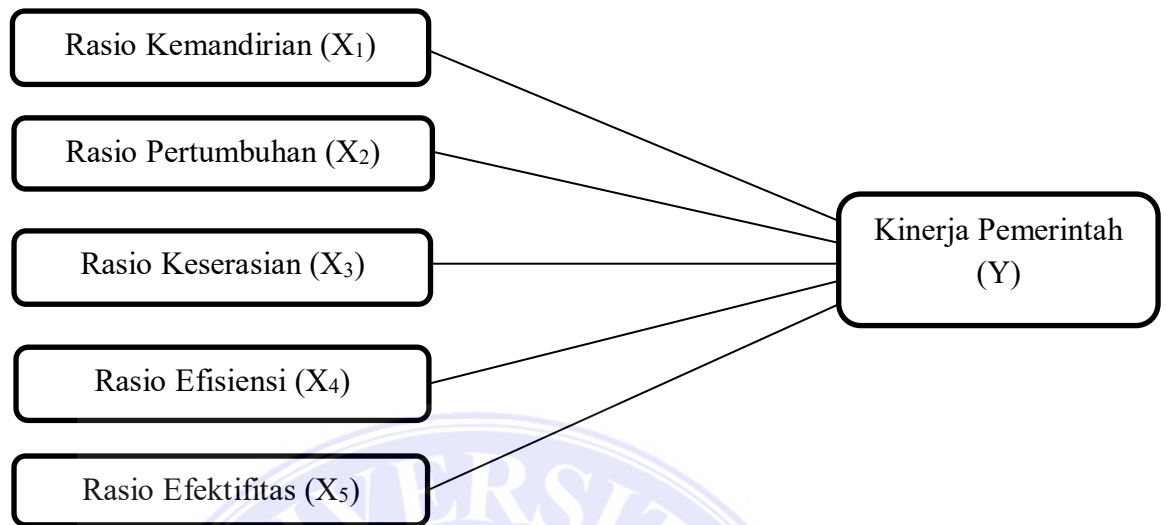
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kota Surakarta (Wita Liantino 2018)	Rasio Kemandirian Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Kinerja Keuangan	Rasio kemandirian Kota Surakarta rata-rata 85,53%, tergolong hubungan delegatif. Rasio efektivitas rata-rata 54,22%, tidak efektif. Rasio efisiensi dengan rata-rata 377,184%, tidak efisien. Rasio keserasian dengan rata-rata sebesar 36,79%. Rasio pertumbuhan rata-rata sebesar 20,17 % artinya pertumbuhan Kota Surakarta dinyatakan cukup baik.
2	Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010 - 2014 (Rigel Nurul Fathah 2017)	Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian, Kinerja Keuangan.	Rasio efektivitas Kabupaten Gunungkidul yaitu 131,8% (sangat efektif). Rasio efisiensi sebesar 109,8%, tidak efisien. Rasio keserasian yaitu pada rasio belanja operasi 13,27% dan pada belanja modal 40,20%, Rasio pertumbuhan dengan rata-rata 41,63%, dan rasio kemandirian dengan rata-rata 10,00%, dinyatakan tidak mandiri.

No	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3	Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada pemerintah Kota Surakarta). (Joko Pramono 2014)	Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, Kinerja Keuangan.	Rasio kemandirian Kota Surakarta dengan rata-rata 20,14%. Rasio keserasian dengan rasio belanja operasi rata-rata 37,81% dan rasio belanja modal rata-rata 11,36% (menunjukkan belanja operasi masih lebih mendominasi pemakaian belanja). Rasio efisiensi dengan rata-rata 21,05%, dinyatakan sangat efisien. Rasio efektivitas dengan rata-rata 98,80% dinyatakan tidak efektif. Serta rasio pertumbuhan yang tumbuh positif yaitu 19,92%.
4	Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: studi kasus Kota Malang (tahun anggaran 2007-2011) (Oesi Agustina. A 2013)	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Rasio Pertumbuhan, Kinerja Keuangan.	Rasio kemandirian keuangan Kota Malang memiliki rata-rata 18,76% dinyatakan tergolong pola instruktif. Rasio efektivitas sebesar 105,4% dinyatakan efektif, rasio efisiensi 4,89%, sangat efisien. Rasio keserasian belanja rutin yaitu 76,8%, dan rasio belanja pembangunan sebesar 22,2% yang mana pemerintah lebih memprioritaskan belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan positif dengan rasio sebesar 15,19%.
5	Analisis rasio keuangan daerah sebagai penilaian kinerja pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Semarang periode tahun 2009-2013 (Fitri Umi Hanik, Tutik Dwi Karyanti, 2014)	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, DSCR (<i>Debt Service Coverage Ratio</i>) Kinerja Keuangan.	Rasio kemandirian Kabupaten Semarang masih rendah yaitu dengan rata-rata 14,82%. Rasio efektivitas sebesar 100,14%, berjalan efektif. Rasio Efisiensi sebesar 0,76% yang berarti efisien. Rasio keserasian belanja operasi 80,94%, belanja pembangunan 14,96%, dimana belanja operasi masih mendominasi. Rasio pertumbuhan sebesar 15,49%. Serta tingkat DSCR DPPKAD diatas 2,5%

No	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
6	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016 (Dina Fitrianingrum 2017)	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Kinerja Keuangan.	Rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2014-2016 yaitu dengan rata-rata 30,24% termasuk dalam pola hubungan konsultatif. Rasio efektivitas dinyatakan efektif yaitu 116,26%. Rasio efisiensi dengan hasil masih kurang efisien dengan rata-rata 92,04%. Rasio belanja modal (17,06%) lebih dominan dialokasikan pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Rasio pertumbuhan yang masih sangat rendah yaitu 4,01%.
7	Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja APBD. Studi kasus pada Daerah Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tahun 2015-2017 (Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani 2019)	Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Kinerja Keuangan.	Rasio kemandirian Daerah Bulak masih rendah yaitu 2,07% dengan pola hubungan instruktif. Rasio Keserasian yaitu belanja rutin dengan rata-rata 41%, untuk belanja modal sebesar 38,67%, dimana belanja modal lebih mendominasi. Pertumbuhan cukup baik, yaitu belanja rutin sebesar 42%, sedangkan dari belanja modal sebesar 43%. Rasio efisiensi dinyatakan tidak efisien sebesar 100%, rasio efektivitas yaitu sebesar 100%, yang menunjukkan kinerjanya efektif.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, data untuk penelitian ini diambil dari APBD dan LRA Kota Gunungsitoli tahun 2015 s/d 2020, kemudian akan dihitung rasio keuangannya masing-masing yaitu rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Dengan menggunakan laporan realisasi anggaran dan APBD Kota Gunungsitoli akan dimanfaatkan untuk menghitung rasio tersebut. Berbeda dengan rasio keserasian yang terdiri dari 2 rasio yaitu rasio belanja rutin/operasi dan rasio belanja modal/pembangunan. Data belanja operasi dan total APBD akan digunakan dalam perhitungan rasio belanja rutin, sedangkan data belanja pembangunan dan total APBD akan digunakan dalam menghitung rasio belanja modal dan pada rasio efektifitas digunakan total PAD yang terdapat pada laporan APBD. Setelah penyelesaian hitungan rasio, hasilnya akan digunakan untuk dianalisis dan dibandingkan dari tahun 2015 s/d 2020, yang menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD selama enam tahun berturut-turut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif, karena data yang digunakan berbentuk angka-angka dari laporan keuangan kota. Pada penelitian ini dilakukan perhitungan dan analisa data keuangan untuk mengetahui kinerja pemerintah kota dengan menilai laporan keuangan berdasarkan rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Setelahnya akan terbentuk gambaran situasi data yang sesuai dengan tujuan penelitian yang akan diproses dan ditarik kesimpulannya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai tiap variabel yang sifatnya independen tanpa membentuk sebuah hubungan dengan variabel lain (V. Wiratna Sujarweni, 2014:11). Menurut Sugiyono (2017:8), Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang dipakai untuk mengamati populasi dan sampel tertentu, pengambilan data yakni dengan ciri statistik dengan tujuan agar dapat menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. Waktu penelitian ini bertahap mulai pada bulan September 2021-selesai.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Keterangan	Bulan						
	Sept 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Apr 2022	Mei 2022	Juni 2022
Pengajuan Judul Skripsi							
Penyusunan Proposal							
Bimbingan Proposal							
Seminar Proposal							
Seminar Hasil							
Penyusunan Skripsi							
Sidang Meja Hijau							

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian mengemukakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek yang memiliki karakter serta kualitas tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari agar kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan Kota Gunungsitoli Sumatera Utara.

2. Sampel

Menurut Silaen (2018:87) sampel adalah bagian dari populasi yang ditentukan dengan kaidah tertentu untuk diukur serta diamati karakteristiknya. Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan laporan realisasi anggaran (LRA) Kota Gunungsitoli Sumatera Utara periode 2015-2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh peneliti, namun melalui perantara atau dengan dokumen. Sumber data penelitian menjadi faktor penting dalam penentuan metode pengumpulan data (Indriantoro dan Supomo : 2014). Sumber data diperoleh peneliti yakni dari laporan keuangan tahunan daerah yang didapat melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk Kementerian Keuangan).

3.4 Definisi Dan Indikator Operasional Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Variabel Penelitian

Definisi variabel penelitian merupakan suatu sifat, nilai maupun ciri dari objek yang memiliki variasi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti untuk diamati kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:38).

Definisi variabel dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas dan variabel yang keberadaannya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam peneliti ini adalah Kinerja Pemerintah.

- a. Kinerja Pemerintah : merupakan gambaran tentang pencapaian tujuan dan target pemerintah sebagai realisasi dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan. (BPPK Depkeu, 2014).

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain dan merupakan sebab perubahan atau timbulnya variabel *dependent* (terikat).

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi dan Rasio efektivitas.

- a. Rasio Kemandirian : merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan membagi antara total PAD dengan pendapatan yang bersumber dari pihak eksternal dalam satuan persen. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal daerah semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah, apabila rasio kemandirian tinggi maka partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin tinggi (Alfiah, 2016).
- b. Rasio Pertumbuhan : merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan pencapaian yang telah diraih dari setiap periode di tengah pertumbuhan perekonomian (Kasmir, 2013:116).
- c. Rasio Keserasian : merupakan rasio yang menggambarkan pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana anggaran pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Tingginya persentase pengalokasian dana pada belanja rutin maka persentase belanja modal yang digunakan untuk kepentingan publik cenderung semakin rendah (Halim, 2012:236).
- d. Rasio Efisiensi : merupakan rasio yang menggambarkan pengukuran tingkat penghematan anggaran oleh pemerintah daerah, dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja. Semakin kecil rasio efisiensi, maka kemampuan daerah semakin efisien (Mardiasmo, 2013:112).

e. Rasio Efektivitas : digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dinyatakan efektif apabila rasio mencapai 100%. Apabila semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Nurhayati, 2015:58).

3.4.2 Indikator Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3.2
Definisi dan Indikator Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Rasio Kemandirian (X ₁)	Rasio kemandirian adalah rasio yang mengukur besar ketergantungan pemerintah terhadap bantuan eksternal (Sularso dan Restianto 2013:113)	$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$	Rasio
Rasio Pertumbuhan (X ₂)	Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keberhasilan yang diraih dalam setiap periode. (Welio Wonda 2016:198)	$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{pendapatan tahun berjalan} - \text{pendapatan tahun sebelumnya}}{\text{pendapatan tahun sebelumnya}}$	Rasio
Rasio Keserasian (X ₃)	Rasio keserasian digunakan untuk mengetahui pengalokasian dana dalam belanja operasi dan belanja modal. (Halim 2012:236)	$\text{Rasio belanja rutin :} \frac{\text{Belanja operasi}}{\text{Total APBD}}$ $\text{Rasio belanja modal :} \frac{\text{Belanja pembangunan}}{\text{Total APBD}}$	Rasio

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Rasio Efisiensi (X ₄)	Rasio efisiensi digunakan dalam mengukur <i>input&output</i> pendapatan daerah. (Abdul dan Muhammad 2019:163)	Rasio Efisiensi : $\frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Rasio Efektivitas (X ₅)	Rasio efektivitas digunakan dalam mengukur realisasi anggaran dibanding target pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. (Faud 2016:140)	Rasio Efektivitas : $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD berdasarkan potensi riil}} \times 100\%$	Rasio
Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja merupakan gambaran realisasi kegiatan yang menjadi target organisasi. (Fahmi 2012:2)		Rasio

3.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini data akan dianalisis dengan melakukan perhitungan dan pengolahan data untuk variabel bebas dengan menggunakan *Microsoft Office Excel*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Dokumentasi yang berupa APBD dan LRA Kota Gunungsitoli periode tahun 2015 s/d 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis rasio keuangan Kota Gunungsitoli dalam menilai kinerja pemerintah berdasarkan APBD periode tahun 2015 s/d 2020 yang telah diuraikan maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pada rasio kemandirian pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020 menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih belum bisa mandiri. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pemerintah terhadap bantuan pemerintah pusat yang masih tinggi.
2. Pada rasio pertumbuhan pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020 menunjukkan pertumbuhan kinerja pemerintah mengalami pertumbuhan yang masih sangat rendah dimana perolehan pendapatan tidak stabil dalam setiap tahunnya dan mengalami kenaikan dan penurunan yang cenderung fluktuatif.
3. Pada rasio keserasian pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020 menunjukkan rata-rata belanja operasi yang masih belum mendominasi karena kurang dari 60%. Sedangkan rata-rata belanja modal dikatakan baik karena mendominasi yaitu lebih dari 20%.
4. Pada rasio efisiensi pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020 menunjukkan kinerja pemerintah masih belum

efisien karena belum bisa menekan total belanja daerahnya dengan rasio 100,67% (melebihi 100%).

5. Pada rasio efektivitas pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020 tergolong tidak efektif karena realisasi PAD masih kurang dari yang target PAD yang dianggarkan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan guna untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli serta penelitian selanjutnya yang sejenis antara lain :

1. Dengan hasil analisis rasio kemandirian kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli, diharapkan pemerintah dapat berupaya untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya dan mampu meningkatkan kemandirian daerah. Serta peningkatan ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam hal membayar kewajiban pajak dan retribusi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial. Sebaiknya pemerintah tidak selalu mengandalkan bantuan pemerintah pusat agar kedepannya mampu mengelola keuangannya dengan baik, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pada rasio pertumbuhan pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan APBD, meskipun tidak stabilnya perolehan pendapatan namun pemerintah diharapkan dapat mengelola keuangan dengan stabil dan optimal.

3. Berdasarkan hasil rasio keserasian kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli, sebaiknya lebih proporsional dalam mengalokasikan belanjanya dengan mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal karena pada dasarnya dana pada anggaran merupakan dana publik yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memberikan perhatian lebih terhadap pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan serta dinikmati langsung oleh publik dalam jangka panjang.
4. Pada rasio efisiensi, kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli juga diharapkan dapat mengurangi serta membatasi penggunaan dana pada belanjanya agar dapat sinkron dengan pendapatannya. Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu menghitung secara detail besarnya dana yang digunakan untuk merealisasikan segala pendapatan yang diterimanya, agar dapat diketahui cara akumulasi pendapatannya efisien atau tidak. Walaupun pemerintah Kota Gunungsitoli telah merealisasikan penerimaan pendapatannya sesuai dengan target yang ditentukan sebelumnya, namun biaya untuk meraup pendapatan lebih besar dari target pendapatannya, maka itu menjadi sia-sia. Pemerintah juga harus mampu meningkatkan kemampuan dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan.
5. Dengan hasil analisis rasio efektivitas pemerintah Kota Gunungsitoli diharapkan mampu dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi, juga dalam pendayagunaan hasil kekayaan daerah dengan optimal agar mampu memenuhi target yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, O. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 355–365.
- Aisah Fitri, D. (2017). Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Desa Dan Rasio Pertumbuhan Desa Terhadap Kinerja Keuangan Desa Tahun 2014 – 2015 (Studi Kasus di desa Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Miri). *11(2)*, 1–15.
- Arja Sadjiarto. (20 C.E.). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), pp.138-150.
- Daerah, S. (2017). *Rencana Strategis Sekertariat Kota Gunungsitoli*.
- DJPK, K. K. (2021). *APBD-2015_Kota Gunungsitoli*.
- DJPK, K. K. (2016). *APBD-2016_Kota Gunungsitoli*.
- DJPK, K. K. (2017). *APBD-2017_Kota Gunungsitoli*.
- DJPK, K. K. (2018). *APBD-2018_Kota Gunungsitoli*.
- DJPK, K. K. (2019). *APBD-2019_Kota Gunungsitoli*.
- DJPK, K. K. (2020). *APBD-2020_Kota Gunungsitoli*.
- DJPK, K. K. (2020b). *LRA_APBDD-2014_Kota Gunungsitoli*.
- DJPK, K. K. (2020c). *LRA_APBDD-2015_Kota Gunungsitoli*.
- DJPK, K. K. (2020d). *LRA_APBDD-2016_Kota Gunungsitoli*.
- DJPK, K. K. (2020e). *LRA_APBDD-2017_Kota Gunungsitoli*.
- DJPK, K. K. (2020f). *LRA_APBDD-2018_Kota Gunungsitoli*.
- DJPK, K. K. (2020g). *LRA_APBDD-2019_Kota Gunungsitoli*.
- DJPK, K. K. (2021b). *LRA_APBDD-2020_Kota Gunungsitoli*.
- Elly Susanti, Kharis Raharjo, A. O. (2017). Analisis Rasio Laporan Keuangan APBD Sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga tahun anggaran 2012-2016, 1–16.
- Eva, Y. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng, 33–35.

- Fathah, R. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Fitrianingrum, D. (2016). Analisis Rasio Keuangan Untuk menilai Kinerja Keuangan PEMDA Kabuppaten Bantul 2014-2016. Stie Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Gunungsitoli, B. K. (2019). *Rencana Strategis BPKPD Kota Gunungsitoli*.
- Hanik, F. . dan, & Karyanti, T. . (2014). Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Perbankan Indonesia*, 22(2), 143–156.
- Kasmir (2018). *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Liantino, W. (2018). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kota Surakarta. 1–16.
- Martiastuti Intan, D. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(2), 29–36.
- Maumeha, M. . dkk. (2017). Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Di Desa Dokulamo Kecamatan Galela Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Nugraha, Y. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Kementerian Keuangan Indonesia*, 1, Publikasi.
- Nurdiwaty, D., & Zaman, B. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah di Kota Kediri. *Journal of Innovation in Business & Economics*, 7(1), 31–40.
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(33), 55–66.
- Oktrivina, A., & dkk. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE*, 9(1), 1–19.
- Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri. (2007). Menteri dalam negeri republik indonesia. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 1–13.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112.
- Putri, H. (2011). Analisis Rasio Kemampuan, Kemandirian dan Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *JOMFikom*, 4(1), 1–13.

- Ramadhani, D. A. . (2013). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Pada Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan).
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 738–747.
- Sobaruddin. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 – 2018).
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63–78.
- Suhendra, D. (2020). “Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Akrab Juara*, 5(1), 43–54.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92.
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91–98.

Lampiran 1 Data Penelitian

APBD Kota Gunungsitoli Periode Tahun Anggaran 2015-2017

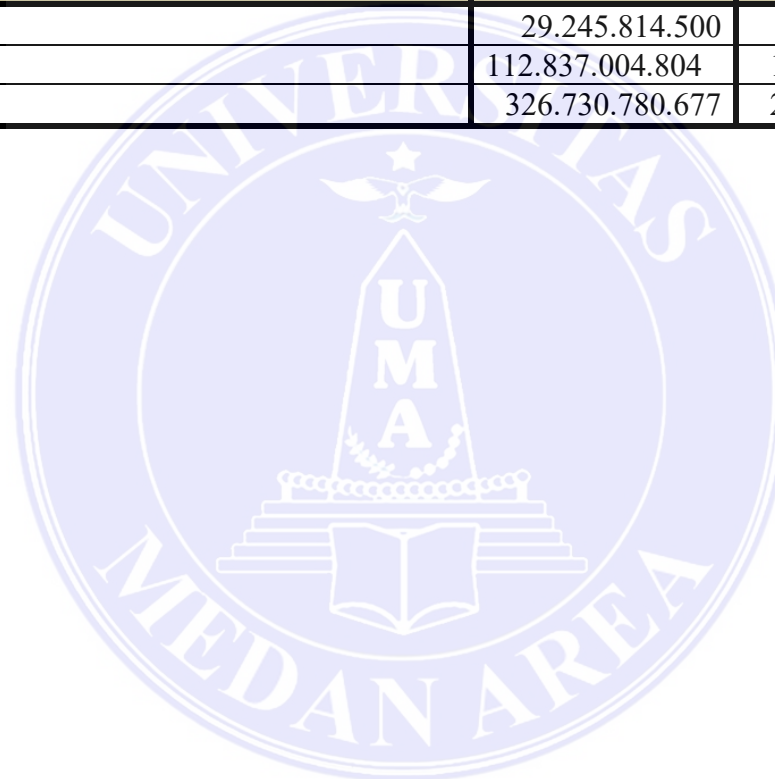
Akun	2015	2016	2017
Pendapatan Daerah	554.999.026.615	763.778.038.680	699.262.251.200
Pendapatan Asli Daerah	34.400.000.000	28.000.000.000	34.937.400.200
Hasil Pajak Daerah	9.513.250.000	12.355.000.000	14.000.000.000
Hasil Retribusi Daerah	10.900.000.000	1.587.000.000	4.210.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.986.750.000	14.058.000.000	16.727.400.200
Dana Perimbangan	452.637.143.000	653.064.054.680	639.324.851.000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak	11.347.000.000	15.327.586.000	10.116.910.000
Dana Alokasi Umum	397.362.423.000	434.259.520.000	434.259.520.000
Dana Alokasi Khusus	43.927.720.000	203.476.948.680	194.948.421.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	67.961.883.615	82.713.984.000	25.000.000.000
Pendapatan Hibah	1.250.000.000		-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	7.500.000.000	20.200.000.000	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52.085.157.000		-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-		-
Pendapatan Lain-lain	7.126.726.615	62.513.984.000	25.000.000.000
Belanja Daerah	602.758.065.425	768.570.868.680	723.761.500.349
Belanja Tidak Langsung	300.837.050.026	419.648.611.727	404.449.384.003
Belanja Pegawai	274.980.123.411	324.795.785.937	272.044.203.003
Belanja Hibah	8.175.000.000	5.609.086.490	3.000.000.000

Akun	2015	2016	2017
Belanja Bantuan Sosial	2.075.000.000	400.000.000	1.778.000.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	14.606.926.615	87.843.739.300	126.827.181.000
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	800.000.000
Belanja Langsung	301.921.015.399	348.922.256.953	319.312.116.346
Belanja Pegawai	24.233.667.900	28.274.206.750	29.471.473.500
Belanja Barang dan Jasa	101.975.943.208	113.862.896.253	103.140.252.175
Belanja Modal	175.711.404.291	206.785.153.950	186.700.390.671

APBD Kota Gunungsitoli Periode Tahun Anggaran 2018-2020

Akun	2018	2019	2020
Pendapatan Daerah	696.982.462.664	741.798.417.924	769.395.591.349
Pendapatan Asli Daerah	36.676.262.664	34.019.889.165	36.896.811.787
Hasil Pajak Daerah	16.150.000.000	16.000.000.000	14.500.000.000
Hasil Retribusi Daerah	3.050.000.000	3.000.000.000	2.209.846.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.476.262.664	15.019.889.165	20.186.965.787
Dana Perimbangan	557.813.984.000	577.999.359.759	589.429.985.562
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak	17.305.249.000	16.913.714.759	16.484.711.562
Dana Alokasi Umum	426.758.929.000	446.102.654.000	452.305.776.000
Dana Alokasi Khusus	113.749.806.000	114.982.991.000	120.639.498.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	102.492.216.000	129.779.169.000	143.068.794.000
Pendapatan Hibah	-	20.701.400.000	20.701.400.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	25.000.000.000	20.000.000.000	32.000.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	89.077.769.000	90.367.394.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-
Pendapatan lain-Lain	77.492.216.000	-	-
Belanja Daerah	873.639.477.216	900.840.799.374	789.395.591.349
Belanja Tidak Langsung	404.825.877.235	428.360.818.817	449.309.344.022
Belanja Pegawai	268.999.437.435	275.448.059.517	271.049.934.566
Belanja Hibah	8.559.600.000	8.756.900.000	37.711.928.300
Belanja Bantuan Sosial	442.206.000	502.206.000	50.000.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	124.644.633.800	137.968.903.300	136.735.892.556

Akun	2018	2019	2020
Belanja Tidak Terduga	500.000.000	500.000.000	2.090.604.000
Belanja Langsung	468.813.599.981	472.479.980.557	340.086.247.326
Belanja Pegawai	29.245.814.500	37.025.363.000	6.936.679.500
Belanja Barang dan Jasa	112.837.004.804	140.720.388.222	178.721.210.678
Belanja Modal	326.730.780.677	294.734.229.335	154.428.357.148



Laporan Realisasi Anggaran Kota Gunungsitoli Periode Tahun Anggaran 2015-2017

Akun	2015	2016	2017
Pendapatan Daerah	622.748.088.670	706.216.779.805	691.423.299.086
Pendapatan Asli Daerah	24.334.650.845	29.185.403.160	29.769.903.264
Hasil Pajak Daerah	8.889.914.754	11.539.708.660	13.254.315.199
Hasil Retribusi Daerah	1.153.335.220	1.356.153.690	1.377.137.370
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.291.400.871	16.289.540.810	15.138.450.695
Dana Perimbangan	491.849.107.813	612.805.752.844	546.848.082.574
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak	10.558.964.813	13.459.091.048	11.465.284.763
Dana Alokasi Umum	397.362.423.000	434.259.520.000	426.630.977.000
Dana Alokasi Khusus	83.927.720.000	165.087.141.796	108.751.820.811
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	106.564.330.012	64.225.623.801	114.805.313.248
Pendapatan Hibah	33.589.750	712.194.320	6.000.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	20.617.625.132	29.095.744.618	29.327.708.924
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	79.719.583.000	32.582.079.863	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6.193.532.130	1.835.605.000	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	79.477.604.324
Belanja Daerah	584.939.494.463	671.936.300.380	778.005.373.504
Belanja Tidak Langsung	283.579.779.885	335.968.150.190	415.511.300.111
Belanja Pegawai	255.253.131.843	273.202.312.425	260.433.408.460
Belanja Hibah	19.928.711.145	4.325.843.765	5.288.400.000
Belanja Bantuan Sosial	296.120.000	300.000.000	694.924.000

Akun	2018	2019	2020
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.038.054.697	58.139.994.000	149.094.567.651
Belanja Tidak Terduga	63.762.200	-	-
Belanja Langsung	301.359.714.578	370.026.427.105	362.494.073.393
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	91.866.088.302	109.888.218.756	112.876.474.541
Belanja Modal	209.493.626.276	260.138.208.349	249.617.598.853

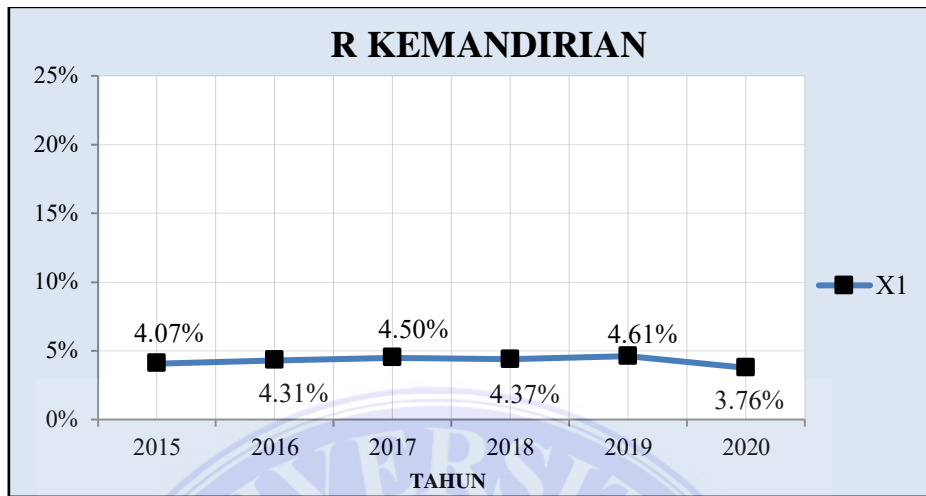
Laporan Realisasi Anggaran Kota Gunungsitoli Periode Tahun Anggaran 2018-2020

Akun	2018	2019	2020
Pendapatan Daerah	702.840.277.059	730.739.514.034	703.793.539.789
Pendapatan Asli Daerah	29.456.354.563	32.209.121.389	25.530.252.953
Hasil Pajak Daerah	15.015.862.740	15.090.778.123	11.951.902.720
Hasil Retribusi Daerah	1.978.330.163	2.215.837.017	2.591.503.580
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.462.161.660	14.902.506.249	10.986.846.653
Dana Perimbangan	552.039.778.301	559.094.823.827	529.186.588.779
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak	15.374.623.215	13.474.484.808	15.595.535.434
Dana Alokasi Umum	426.758.929.000	446.102.654.000	406.222.095.000
Dana Alokasi Khusus	109.906.226.086	99.517.685.019	107.368.958.345
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	121.344.144.195	139.435.568.818	149.076.698.057
Pendapatan Hibah	20.691.120.000	32.405.057.021	25.664.854.555
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	19.694.073.886	22.063.628.797	20.207.478.902
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	76.000.480.809	84.966.883.000	14.065.588.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	4.958.469.500	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	89.138.776.600
Belanja Daerah	702.837.581.848	732.295.074.461	719.249.942.772
Belanja Tidak Langsung	406.459.002.888	402.710.152.576	430.127.437.675
Belanja Pegawai	283.196.425.346	256.823.303.817	256.834.602.839
Belanja Hibah	7.377.200.000	8.626.274.500	35.990.311.750
Belanja Bantuan Sosial	440.409.225	440.303.543	687.600.000

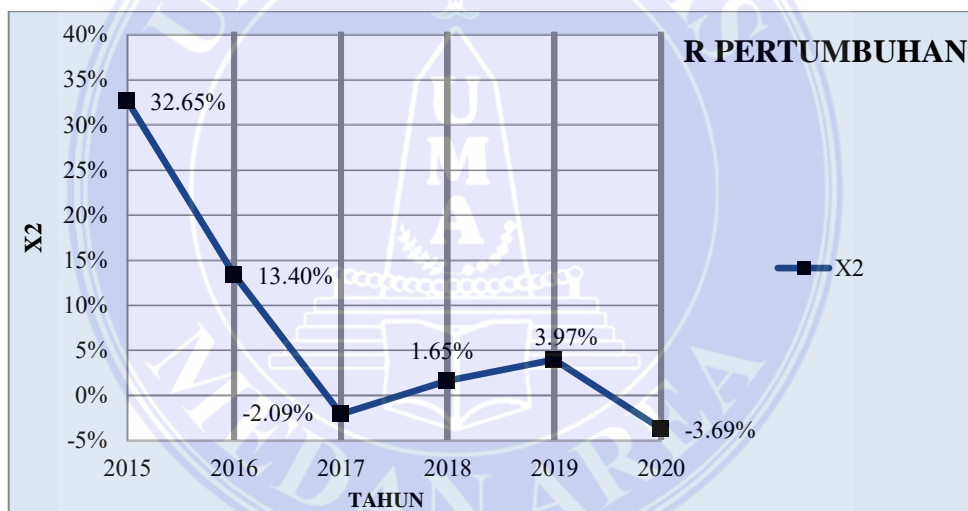
Akun	2018	2019	2020
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	115.331.128.611	136.820.270.716	130.589.573.497
Belanja Tidak Terduga	113.839.706	-	4.868.795.526
Belanja Langsung	296.378.578.960	329.584.921.885	289.122.505.097
Belanja Pegawai	-	36.163.816.842	-
Belanja Barang dan Jasa	112.857.294.644	136.663.819.001	143.244.890.361
Belanja Modal	183.521.284.315	156.757.286.042	145.877.614.736

Lampiran 2 Output Hasil Penelitian

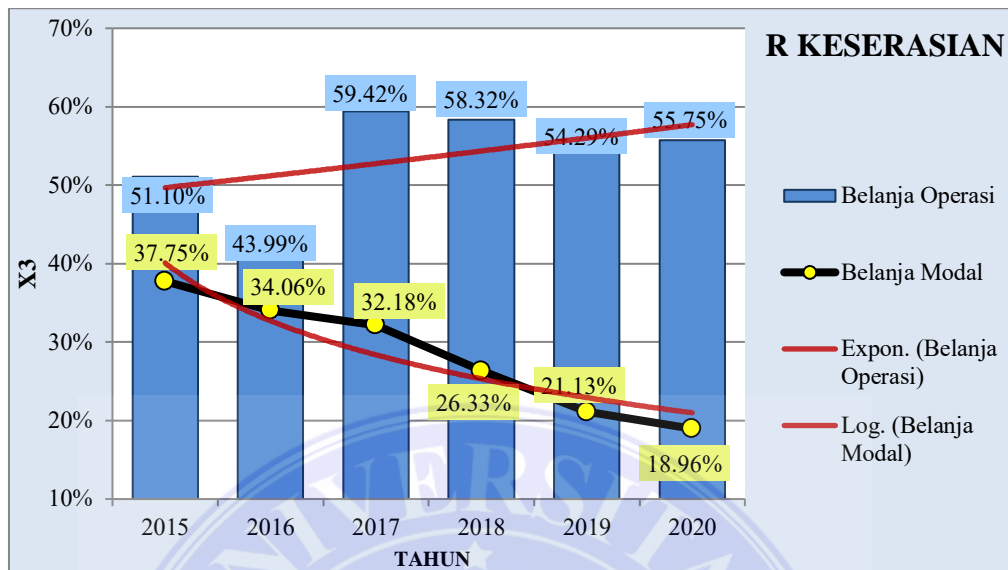
Rasio Kemandirian



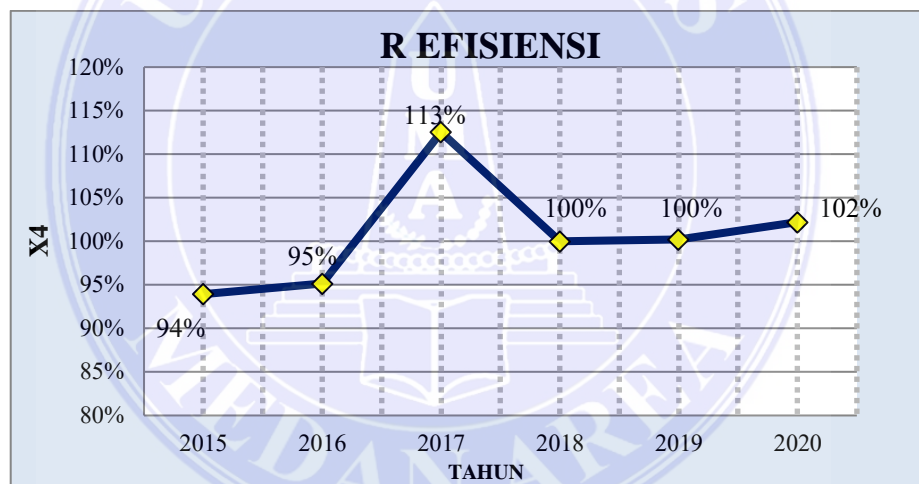
Rasio Pertumbuhan



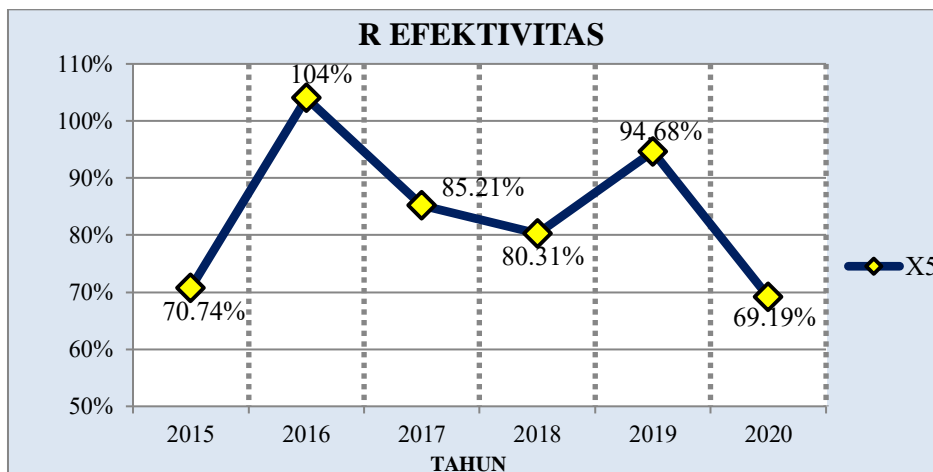
Rasio Keserasian



Rasio Efisiensi



Rasio Efektifitas



Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

